

---

# **Penilaian terhadap Korupsi dengan cara Partisipatif**

**(Participatory Corruption Appraisal)**

---

Metodologi untuk Mengukur Dampak Korupsi  
terhadap Orang Miskin di Daerah Perkotaan

---

**oleh**

**Tim “Korupsi dan Orang Miskin”**

**Didasarkan hasil Proyek “Korupsi dan Orang Miskin”  
yang berlangsung di Indonesia pada tahun 2000-2001**

Diterbitkan oleh Kemitraan bagi  
Pembaruan Tata Pemerintahan dan Bank Dunia

Tim "Korupsi dan Orang Miskin" termasuk:

<b>Stefanie Teggemann (Project Manager)</b>	World Bank, Indonesia
<b>Sarwar Lateef (Task Manager)</b>	(Bank Dunia, Indonesia)
<b>Alexander Irwan (Consultant)</b>	
<b>Darma Irfani (Consultant)</b>	

<b>Richard Holloway</b>	The Partnership Governance Reform (Kemitraan)
-------------------------	---

<b>Y. Arihadi (Field Work Team Leader)</b>	Yayasan Bina Swadaya
--	----------------------

<b>Sударman Mugiyo Kusmartono</b>	YBS Yogyakarta
---	----------------

<b>Supiyanto Bambang Pujiono Natalia Ita Septiana Yuli Widiatmanta Casiyanto Camelia Istu Pinilih</b>	YBS Jakarta
---	-------------

<b>Christina Joseph (Team Leader Makassar)</b>	LBH-P2I, Makassar
<b>Ely Sambominanga Irfan Yahya Muhammad Yusuf</b>	

Buku ini ditulis oleh Richard Holloway dan Stefanie Teggemann

## Daftar Isi

---

<b>Daftar isi</b>	3
<b>Pengantar</b>	5
<b>Kerangka Korupsi</b>	7
<b>Penelitian Mengenai Korupsi</b>	9
<b>Tujuan Penilaian Terhadap Korupsi dengan Cara Partisipatif (PCA)</b>	10
<b>Langkah-langkah dalam Penilaian terhadap Korupsi dengan Cara Partisipatif</b>	12
<b>Selangkah Demi Selangkah</b>	
Langkah 1. Temu-kenali Suatu Organisasi	13
Langkah 2. Temu-kenali Suatu Masyarakat	15
Langkah 3. Temu Kenali dan Didik Pekerja Lapangan	17
Langkah 4. Kunjungan Pertama ke Masyarakat yang Diteliti	19
<b>Rapat Perkenalan dengan Masyarakat</b>	
(a) Perkenalan Tim Riset dan Tujuan Proyek	20
(b) Permainan untuk Melonggarkan Ketegangan Antar-Peserta ( <i>Ice-Breaking</i> )	20
(c) Klasifikasi Kekayaan	20
(d) Pemetaan Masyarakat	21
<b>Diskusi pertama dalam Kelompok Fokus</b>	
(a) Perkenalkan anggota Tim kepada Peserta	23
(b) Jelaskan Mengenai Proyek	23
(c) Adakan Permainan untuk Memperlancar komunikasi	23

(d) Pemetaan dari Jawatan-jawatan Pelayanan Umum	23
(e) Pungutan Liar	23
(f) Persepsi	25
<b>Diskusi Kelompok Fokus yang Kedua</b>	
(a) Presentasi Permasalahan dan Rangka	26
(b) Flow Diagram tentang Sebab dan Akibat	27
<b>Diskusi Kelompok Fokus Ketiga</b>	
• Tukar Pikiran Mengenai Jalan Keluar	30
• Wawancara	31
Langkah 5. <b>Menyiapkan bahan informasi yang terkumpul</b>	32
Langkah 6. <b>Kunjungan kedua ke masyarakat</b>	33
Pertemuan Masyarakat	34
Pertemuan Para Stakeholders	35
<b>Kesimpulan</b>	37
<b>Ilustrasi Proses</b>	37
Foto orang sedang melakukan pemetaan masyarakat di Yogyakarta	39
Foto orang sedang bekerja membuat diagram alur proses di Makassar	39
Foto orang sedang curah pendapat mencari solusi di Makassar	39
Diagram Alur Proses Distribusi Beras JPS di Makassar	40

## Pengantar

---

Di negara-negara dimana praktek korupsi berlangsung secara sistemis dan mengikuti suatu struktur, korupsi akan memberi dampak yang berbeda terhadap lapisan sosial yang saling berbeda. Besarnya perbedaan tersebut tergantung kepada daya kekuatan masing-masing lapisan masyarakat serta siapa saja yang bisa mereka hubungi diantara yang berkuasa.

Lima faktor mendasar menentukan kedudukan kaum miskin terhadap mereka yang berkuasa dan berkorupsi, yaitu:

- Orang miskin tidak memiliki sumber keuangan
- Orang miskin tidak memiliki informasi, pengetahuan, dan pendidikan formal
- Orang miskin tidak didukung oleh sistem hukum maupun oleh polisi
- Orang miskin tidak mempunyai suara dalam wacana publik
- Orang miskin tidak mempunyai koneksi dengan yang berkuasa

Orang miskin, yang menurut definisinya adalah kaum yang dimarginalkan, dikucilkan, tertindas serta tereksplorasi, tidak berdaya terhadap mereka yang berada dalam posisi penentu dan menguasai akses terhadap barang dan jasa. Mereka mungkin juga buta huruf dan tidak mengenal harga-harga resmi dari barang dan jasa yang diperlukan.

Sebaliknya, para penguasa (khususnya mereka yang lebih berkuasa terhadap kaum miskin) mampu memeras dan mengadakan pungutan liar untuk jasa-jasa

yang seharusnya tersedia cuma-cuma atau biaya resmi. Hal ini bisa terjadi karena mereka menguasai barang dan jasa yang diinginkan oleh orang lain untuk mana dapat dikutip harga yang sangat mahal. Hal ini bisa juga dilaksanakan karena pengalaman panjang telah membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah dihukum bahkan mereka hampir-hampir kebal hukum.

Oleh karena itu, maka orang miskin merupakan kaum yang justru memberi menjadi penyogok, terutama apabila mereka diperas, dan karenanya mereka akan jauh lebih menderita dibanding mereka yang berkuasa ataupun mempunyai hubungan dengan yang berkuasa. Sumber-sumber yang mereka miliki sangat terbatas, dan kemampuan mereka untuk membayar lebih mahal bagi apa yang diperlukan, dengan demikian akan terbatas pula. Sedangkan mereka yang berpendapatan lebih (walaupun sedikit) akan mampu membayar punli untuk barang dan jasa yang diperlukan, yang tidak mungkin dibayar oleh kaum miskin dan sebagai akibatnya, tidak akan mungkin mendapatkannya.

di ngara-negara dimana korupsi berlangsung secara sistematis (yaitu negara- negara dimana korupsi merupakan hal yang lumrah dan bukan suatu pengecualian, dan dimana korupsi terjadi di semua layanan pemerintahan), maka kaum miskin akan sangat sulit membiayai layanan dasar yang diperlukan seperti a.l. kesehatan, pendidikan untuk anak-anak, air, tanah untuk peru mahan, dan menerima barang dan jasa dari program pemerintah yang diberi bagi mereka (seperti makanan bersubsidi atau gratis). Orang miskin harus memilih bagaimana membelanjakan uangnya yang sangat terbatas, dan dengan demikian mereka tidak mampu membayar jasa yang diperlukan atau hanya dapat menikmati jasa yang bermutu rendah.

Banyak orang di selatan khatulistiwa secara pribadi telah mengalami bagaimana korupsi dilakukan serta dampaknya terhadap orang miskin, dan praktek-praktek khusus dari korupsi tersebut. Mereka telah menderita karenanya dan kadangkala juga menjadi pelaku kejahatan tersebut, tetapi permasalahan korupsi dan praktek-prakteknya hanya akan dibicarakan secara lisan. Tidak tersedia banyak tulisan (khususnya dalam bahasa daerah) dan analisa bagaimana korupsi, secara sistematis, berlangsung dalam masyarakat.

## Kerangka Korupsi

Orang miskin pada dasarnya menderita akibat dua jenis praktek korupsi: yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

- **Korupsi aktif**

Dalam hal ini penduduk yang lebih kaya atau lebih berkuasa dibanding dengan siapa mereka berhubungan sehari-hari, secara aktif mempraktikkan perilaku berkorupsi yang melibatkan kaum miskin secara langsung. Maka kaum miskin akan dipaksa untuk membayar-atau tidak menerima apa yang diinginkan. Perilaku tersebut tergolong kriminal: misalnya apabila melanggar hukum, mensubversi hukum, atau melibatkan jasa atau bantuan yang tidak sah. Perilaku tersebut tergolong “tidak perlu” apabila sogokan diharapkan untuk jasa-jasa yang seharusnya diterima secara cuma-cuma atau murah (dan jelas harganya). Ini merupakan macam korupsi yang telah dijelaskan diatas.

- **Korupsi pasif**

Dalam hal ini kaum miskin terpaksa hidup dengan akibat korupsi yang dilakukan oleh orang-orang disekelilingnya walaupun mereka sendiri tidak terlibat secara aktif didalamnya. Mereka hanyalah menjadi penerima dampak negatif dari korupsi tersebut.

“Korupsi oleh aparaturnegara” (state capture) -yaitu dimana pelaku yang kuat berkolusi dengan pemerintah untuk mempengaruhi suatu kebijakan atau alokasi anggaran di tingkat pusat atau daerah, dan dengan demikian menguntungkan segelintir orang dengan merugikan yang banyak. Dalam hal ini juga termasuk pencurian aset-aset negara yang berdampak pada ekonomi makro, seperti menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan biaya pertumbuhan, dan dengan demikian akan semakin mengurangi kemampuan ekonomi orang miskin untuk membayar jasa-jasa sederhana yang diperlukan.

“Korupsi oleh institusi” (institutional capture)-dimana lembaga-lembaga tertentu seperti pengadilan atau perusahaan air minum dikelola dengan berkorupsi, dengan demikian akan mengurangi kinerja serta efisiensi lembaga dan meningkatkan biaya kelembagaan. Salah satu akibat langsung.

dari keadaan ini, ialah bahwa lembaga-lembaga tersebut hanya bisa diakses oleh penengah (calo) yang akan menarik komisi.

“Korupsi oleh perorangan” (*individual capture*)-dimana orang miskin dirugikan oleh orang-orang di sekitar mereka yang menyogok atau memeras. Dalam situasi yang kompetitif seperti itu, siapa yang tidak mau atau mampu membayar akan kalah dibanding mereka yang membayar.



## Penelitian Mengenai Korupsi

Basanya sangat sulit memperoleh informasi tentang praktek korupsi, karena biasanya akan dirahasiakan dan jarang dipublikasikan. Suatu budaya lisan menentukan siapa yang harus membayar kepada siapa, karena orang miskin tidak akan berbicara mengenai kegiatan korupsi mereka ataupun korupsi orang lain, karena akan bisa berakibat kepada pembalasan terhadap mereka.

Sebenarnya, kaum miskin tidaklah pasif atau takut. Sesuai pengalaman kami, apabila ada suasana yang tepat dan adanya persyaratan dasar yaitu adanya kepercayaan antara kaum miskin dengan kawan bicara, maka akan sangat mungkin ditimba banyak hal mengenai korupsi serta dampaknya terhadap kehidupan kaum miskin. Hal ini juga tergantung kepada suasana nasional dimana riset tersebut lebih mudah dilaksanakan pada masa reformasi atau transisi.

Dokumen ini menggambarkan sebuah metode yang dicoba di tiga lokasi kota di Indonesia pada tahun 2000-2001 sebagai bagian dari proyek yang disebut "Korupsi dan Orang Miskin" yang berhasil memperoleh informasi tentang pikiran- pikiran kaum miskin mengenai praktek-praktek korupsi yang paling menyengsarakan mereka, dan apa yang bisa dilaksanakan. Metodologi ini dipakai berdasarkan praktek PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang dikembangkan dan disesuaikan kepada masalah korupsi, serta program dari Bank Dunia yaitu "Suara-suara Kaum Miskin."

Metodologi tersebut berdasarkan pada tiga prinsip:

- Prinsip partisipasi -dimana perorangan didalam suatu masyarakat diundang dan secara bebas setuju untuk berpartisipasi dalam sesi-sesi tersebut.
- Prinsip kepemilikan lokal -yaitu dimana semua informasi yang dikumpulkan dari masyarakat, dikembalikan kepada masyarakat tersebut dan mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana menggunakan informasi ini.
- Prinsip penelitian aksi -yaitu riset yang bertujuan untuk mencapai aksi, yang akan memperbaiki keadaan. Tindakan- tindakan tersebut akan terdokumentasi agar dapat dipelajari mengenai efektif tidaknya kegiatan tersebut.

# Tujuan Penilaian terhadap Korupsi dengan Cara Partisipatif (PCA)

---

## Tujuan umum

- ialah untuk memahami dampak negatif dari praktek korupsi pada kehidupan kaum miskin
- untuk menyebarkan informasi secara luas kepada para pembuat kebijakan dan publik
- untuk membantu masyarakat dimana PCA diselenggarakan untuk merencanakan dan bertindak untuk mengurangi praktek korupsi

PCA bermula dari riset ke aksi yang dilaksanakan dalam dua fase, yaitu:

1. Fase penelitian -terdiri dari (a) kunjungan pertama ke masyarakat yang bersangkutan dalam rangka kerja lapangan, dan (b) kunjungan kedua yang menghubungkan riset dengan aksi temuan-temuan dilaporkan kembali ke masyarakat, dan proses gerakan aksi dimulai
2. Fase aksi -terdiri dari beberapa kegiatan di lokasi-lokasi yang ditentukan, yang mengikutsertakan LSM, media dan masyarakat.

## Tujuan-tujuan Khusus Fase Penelitian (Kunjungan Pertama)

- ialah untuk mengidentifikasi berbagai cara bagaimana korupsi berdampak kepada kaum miskin (sebab-sebab dan saluran-saluran)

- Untuk mengidentifikasi sejauh mana korupsi telah memasuki kehidupan kaum miskin dan kerugian yang diakibatkan olehnya.
- Untuk mengidentifikasi persepsi kaum miskin tentang berbagai bentuk korupsi dan tingkat frustrasi/kemarahan terhadapnya.
- Untuk mengidentifikasi jalan keluar yang telah diidentifikasi sendiri oleh masyarakat miskin mengenai penanganan korupsi
- Untuk memperoleh studi kasus yang mendokumentasikan pengalaman- pengalaman yang sebenarnya dari kaum miskin dalam menghadapi praktek korupsi

### Tujuan-tujuan Khusus Fase Penelitian (Kunjungan Kedua)

- ialah untuk menunjukkan kembali kepada masyarakat dimana kerja lapangan dilaksanakan, mengenai informasi yang dihimpun dan pengalaman mereka dengan korupsi
- Untuk membantu mereka mengidentifikasi aksi yang realistis yang dapat mereka kerjakan untuk membatasi praktek korupsi
- Untuk mengidentifikasi pelaku lokal lainnya yang mau membantu mereka dalam usaha ini

### Tujuan-tujuan Khusus Fase Aksi

- ialah untuk mensintesis informasi yang diperoleh dari lapangan, menganalisisnya, dan mengembangkannya menjadi pelajaran yang dapat mempengaruhi kebijakan
- Untuk mendokumentasikan studi kasus, menganalisa, dan menyampaikannya secara luas kepada para pengambil keputusan
- Untuk mempublikasikan hasil penelitian tersebut guna mendorong pemikiran-pemikiran baru tentang korupsi dan kaum miskin, dan mendorong pihak-pihak lain untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya

Tujuan metodologi yang dijelaskan pada dokumen ini adalah memfasilitasi fase penelitian (kunjungan pertama dan kedua) yang dapat digunakan oleh para praktisi bagi persiapan dasar bagi fase aksi.

# Langkah-langkah dalam Penilaian terhadap Korupsi dengan Cara Partisipatif

---

## Langkah-langkah

1. Temu-kenali suatu organisasi yang telah dipercaya oleh masyarakat, dan yang bisa memberi Anda informasi yang diperlukan. Organisasi ini biasanya merupakan sebuah LSM yang mempunyai program di satu bidang tertentu (tabungan dan kredit, bagaimana mendirikan koperasi, memberi layanan kesehatan dan bidang pendidikan, dll.), akan tetapi bisa juga merupakan asosiasi dari masyarakat lokal.
2. Temu-kenali suatu masyarakat yang bisa Anda ajak bekerjasama. Didalam masyarakat tersebut hendaknya terdapat cukup banyak orang miskin. Tergantung kepada negara dan budaya yang bersangkutan, maka masyarakat yang dipilih bisa menempati suatu daerah kumuh dan miskin dari kota itu relatif homogen, ataupun dimana terdapat orang miskin di antara suatu masyarakat heterogen. Disini diperlukan juga adanya pembatasan daerah administrasi yang jelas, juga hendaknya berupa masyarakat mandiri yang saling kenal-mengenal dan yang mengetahui, siapa saja yang termasuk di dalam masyarakat ini, dan siapa yang berada diluarnya. Masyarakat ini perlu dipilih yang berjumlah cukup terbatas, agar mereka bisa berkumpul untuk mengikuti pertemuan-pertemuan. Adapun keberhasilan dari pekerjaan ini akan tergantung kepada kesediaan dari masyarakat (terutama dari para pemimpinnya) untuk mau bekerjasama dengan LSM dan dengan Anda.
3. Temu-kenali dan latihlah para pekerja lapangan -pribadi-pribadi dari LSM atau asosiasi masyarakat yang mampu dan mau belajar metodologi ini dan

melaksanakannya dalam masyarakat. Untuk ini diperlukan peningkatan ketrampilan di dalam diskusi fokus kelompok yang partisipatif dan dalam mengadakan wawancara.

4. Lakukanlah kunjungan pertama kepada masyarakat dan setelah 10 hari lakukanlah diskusi fokus kelompok dan wawancarai 25-30 orang.
5. Catat semua informasi yang telah anda kumpulkan dari masyarakat dan aturlah sedemikian rupa hingga memudahkan anda untuk mempresentasikan kelak kepada masyarakat.
6. Lakukanlah kunjungan yang kedua, barangkali setelah dua hari. Dalam pertemuan setengah hari, persentasikanlah informasi anda kepada masyarakat dan diskusikan tindak lanjut berikutnya. Pada kunjungan yang sama, anda harus melakukan pertemuan yang terbuka untuk umum (dengan persetujuan masyarakat) di mana penemuan-penemuan anda tersebut disebarluaskan kepada pendengar yang lebih luas (pejabat pemerintah lokal, LSM lokal, pemimpin tradisional lokal, dan wartawan-wartawan lokal). Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyuarakan secara lebih keras suara masyarakat, dan untuk mencari dukungan dari pihak-pihak lain untuk memberantas korupsi.

## Selangkah Demi Selangkah

### **Langkah 1. Temu-kenali Suatu Organisasi**

Organisasi yang diperlukan hendaknya berupa organisasi yang bergerak dalam pembangunan masyarakat, dan yang telah berpengalaman secara langsung bekerjasama dengan masyarakat, disamping memang ahli dalam metoda partisipatif. Apabila organisasi tersebut sudah pernah mengadakan kerja lapangan di bidang pemahaman dari dampak korupsi terhadap kaum miskin, maka, dengan sendirinya ini akan memberi nilai lebih.

LSM dalam bidang pembangunan masyarakat adalah biasanya yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan ini, akan tetapi organisasi riset atau LSM dalam bidang advokasi bisa juga diajak kerjasama, agar saja mereka memenuhi syarat dan kriteria di atas.

Mengenai sifat struktural dari LSM arus bawah, didefinisi oleh John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project sebagai berikut:

- yaitu mempunyai bentuk organisasi, yaitu mempunyai kenyataan kelembagaan.
- adalah swasta, yaitu terlepas dari pemerintah.
- tidak mencari keuntungan, yaitu tidak akan memberi keuntungan kepada para pemilik atau direktornya.
- mengatur diri sendiri, yaitu bisa mengawasi kegiatan sendiri.
- pekerjaan sukarela, paling tidak untuk sebagiannya, berarti sebagian terbesar waktu mereka bergerak dalam kegiatan sukarela, baik dalam kegiatan kelembagaan, atau dalam pengelolaan organisasi.

Lebih dari itu, organisasi yang diperlukan ialah organisasi yang tidak akan memaksakan solusi-solusi yang mereka anggap adalah yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Juga jangan dipilih organisasi yang memiliki cara bereaksi yang terbatas -yaitu baik yang berupa simpanan atau kredit, pendidikan bagi orang dewasa, kegiatan dan perilaku keagamaan tertentu, atau kegiatan politik tertentu saja.

Organisasi yang dicari ialah lembaga yang bersedia mendengarkan masyarakat di lingkungan dimana ia bekerja, dan tidak akan memaksakan arah dari pembicaraan. Organisasi ini hendaknya juga berkepentingan untuk menyelidiki lebih mendalam tentang apa yang dirasakan masyarakat adalah kebutuhan mereka, tanpa menghiraukan pendapat-pendapat a priori tentang apa yang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.

Organisasi ini juga harus berkeinginan dan mampu bekerja-sama dengan masyarakat bersangkutan, tanpa membatasi diri kepada riset saja. Apabila organisasi ini sudah bekerja di lingkungan masyarakat ini selama waktu yang cukup lama, maka mungkin sekali ia akan terus membantu masyarakat ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersumber kepada pemahaman mereka tentang korupsi. Dengan demikian, maka juga penting bahwa para pekerja dari organisasi ini bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dimana mereka bekerja.

Juga akan sangat menguntungkan apabila bisa ditemu-kenali suatu organisasi yang berpengalaman untuk mendengarkan secara sistematis pengalaman, pengetahuan dan kebijakan dari orang miskin. Ada berbagai macam disiplin atau metodologi yang memberi pengalaman ini -antara lain, PRA (Participatory Rural/Urban Appraisal) atau lanjutannya PLA (*Participatory Learning and Action*: Belajar dan Bertindak secara partisipatif); metode DELTA; Pendidikan untuk

Transformasi, dan lainnya. Anda mungkin juga menemui organisasi atau individu yang terlibat dalam penyusunan buku World Bank: “Suara dari Orang Miskin”.

Akhirnya, selain memiliki pengetahuan lokal mengenai masyarakat yang dipelajari, serta adanya kepekaan terhadap kedudukan dan lingkungan orang miskin, disamping tidak adanya susunan pemiki-an a-priori, maka organisasi ini juga harus menguasai bidang perencanaan, pelaksanaan, penyampaian laporan dan pengelolaan keuangan, dalam program ini.

## Langkah 2. Temu-kenali Suatu Masyarakat

Masyarakat yang dipilih untuk pekerjaan ini mungkin sekali ditemukan oleh organisasi yang Anda ajak kerjasama-dan oleh sebab itu Anda harus mengadakan perjalanan ke daerah kerja dari organisasi ini, dimana ia dipercayai oleh masyarakat, disamping ia memahami masyarakat bersangkutan. Maka, Anda mungkin tidak mempunyai banyak pilihan lain. Bila mungkin, carilah daerah yang cukup beragam, agar bisa meraih pengertian dan pemahaman yang lebih luas mengenai masalah-masalah yang dihadapi orang miskin akibat korupsi. Untuk mudahnya, sebaiknya dipilih daerah dimana data penduduk, pekerjaan dan sebagainya. Tersedia pada organisasi tersebut.

Bilamana ada pilihan, maka faktor-faktor penting berikut perlu dipertimbangkan:

- Di antara masyarakat yang dipilih terdapat sejumlah besar orang miskin. Definisi dari kata “miskin” akan dibahas kemudian, tetapi sekarang cukuplah untuk diketahui dimana letak kawasan kumuh dimana orang miskin melebihi yang tidak-miskin. Juga tergantung kepada budaya dimana Anda bekerja, kemiskinan bisa merupakan masalah homogen- yaitu dimana, sesuai pengertian istilahnya, semua orang di kawasan ini adalah orang miskin. Atau, bisa juga berupa masyarakat heterogen dimana orang miskin hidup bersebelahan dengan yang tidak-miskin. Masyarakat di dalam masyarakat demikian akan sangat sadar terhadap tingkat sosial dan pendapatan dari masing., masing anggotanya. Oalam keadaan demikian maka masyarakat ini merupakan masyarakat yang pad a umumnya miskin, akan tetapi bukan yang “termiskin di antara yang miskin”.

- Masyarakat bersangkutan mempunyai pemimpin yang jelas. Adalah sangat penting untuk mendapat persetujuan dari pemimpin masyarakat untuk melaksanakan program di masyarakat bersangkutan, dan sangat penting untuk meyakinkan mereka akan pentingnya pekerjaan yang Anda lakukan, sehingga pemimpin tersebut juga akan tertarik untuk terlibat di dalamnya. Pemimpin yang dimaksud bisa pejabat formal yang ditunjuk oleh pemerintah, atau pimpinan lokal yang kepemimpinannya diakui oleh masyarakat karena keturunan kekeluargaan, keternamaan, pendidikan atau kepemimpinan agama (atau kombinasi dari unsur-unsur diatas).
- Kadang kala para pemimpin lokal kurang sepaham dengan apa yang Anda ingin lakukan karena mereka sendiri adalah pelaku korupsi terhadap orang miskin, dan mereka enggan kehilangan kekuasaannya. Bagaimanapun, adalah sangat penting bahwa para pimpinan mengerti akan dampak-dampak korupsi terhadap orang miskin, dan dimana mungkin, carilah komitmen mereka untuk mengatasi masalah ini.
- Masyarakat menganggap dirinya sebagai satu komunitas: yaitu adanya pengakuan akan kenyataan bahwa mereka hidup di satu kawasan administratif, memiliki satu bahasa yang sama, berasal dari satu suku bangsa yang sama, atau mereka merupakan satu komunitas karena mereka menempati suatu kawasan geografis tertentu. Ini berarti bahwa masyarakat tersebut meyakini batas-batasnya dan mengenal siapa-siapa yang tergolong ke dalamnya dan siapa yang berada di luarnya. Pemahaman dan identifikasi diri dari masyarakat akan membantu dalam mengalihkan pemahaman akan masalah-masalah yang tadinya bersifat pribadi menjadi masalah-masalah yang berdampak kepada orang banyak, dan dengan demikian menjadi masalah yang dihadapi bersama oleh seluruh masyarakat bersangkutan.  
Untuk mudahnya sebaiknya dicari suatu masyarakat yang hidup di kawasan yang cukup terbatas, atau yang diyakini seluruh peserta bisa datang ke tempat rapat, tanpa perlu terlebih dulu menempuh

Sebelum memulai pekerjaan lapangan, para pekerja lapangan hendaknya mengumpulkan data kemiskinan dari masyarakat bersangkutan untuk mengerti secara lebih mendalam tentang tingkat-tingkat sosial-ekonomi yang berlaku dalam masyarakat itu. suatu jarak jauh.



### Langkah 3. Temu Kenali dan Didik Pekerja Lapangan

Ada tiga macam pekerja lapangan, yaitu

- Fasilitator -adalah mereka yang memfasilitasi kelompok-kelompok fokus dalam diskusi dan melapor kembali kepada rapat-rapat.
- Pewawancara -yang mengadakan wawancara.
- Penulis/pencatat -yang menjadi pencatat selama kegiatan riset.

Tergantung kepada mutu dan pengalaman staf, maka pekerja lapangan bisa melakukan ketiga peran tersebut secara bergantian.

Juga akan sangat membantu bila beberapa penulis atau kartunis dimasukkan sebagai anggota tim, beberapa penulis atau kartunis yang mampu menyikap inti dari apa yang didengar, serta mampu menyampaikannya secara sederhana dan jelas.

Para penyelenggara proyek harus berusaha untuk menghimpun seluruh anggota menjadi satu Tim yang kompak, yang jelas mengenai tugas dan tujuannya, dan yang memiliki "semangat tim".

Pekerja lapangan harus berorientasi kepada sasaran-sasaran program, dan jelas mengenai peran masing-masing. Mereka juga harus memahami tentang apa itu korupsi yang tersusun secara sistematis. Untuk tujuan ini mereka agar diminta untuk menyusun peta tentang korupsi dengan matrix yang meliputi semua kasus dalam setiap lembaga yang pernah diketahui atau dialami sendiri di dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian maka tim akan mulai berpikir tentang korupsi dalam masyarakat yang akan dipelajarinya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, organisasi yang terpilih perlu dipilih berdasarkan, antara lain, penilaian terhadap stat organisasi yang cukup fasih dalam metodologi partisipatif. Karenanya diharapkan bahwa tidak semua ketrampilan yang diinginkan, memerlukan pendidikan khusus. Bagaimanapun, organisasi tersebut sebaiknya mengetahui dengan lebih jelas sifat dari berbagai pengalaman yang pernah dilakukan (karena istilah "partisipasi" mempunyai beberapa interpretasi).

Para pekerja lapangan (dalam berbagai bidang) harus memiliki atau akan dididik dalam ketrampilan partisipatif sebagai berikut:

---

**Fasilitator**

Menyelenggarakan diskusi kelompok fokus	Memfasilitasi rapat-rapat
Klasifikasi kekayaan	Pemetaan dari masyarakat
Pemetaan kelembagaan	Presentasi permasalahan serta rankingnya
Flow diagrams dari sebab/akibat	Brainstorming
Mengadakan wawancara	

**Pewawancara**

Mengadakan wawancara yang separo terstruktur

**Pencatat**

Memilih pembahasan kunci	Memilih pernyataan kunci
(PS. Penulisan studi kasus sebaiknya disusun oleh wartawan)	

---

Diperlukan cukup banyak waktu bagi pendidikan dan orientasi staf - terutama menggunakan metoda permainan peran (*role playing*) dan testing lapangan. Sebaiknya training diserahkan kepada seorang ahli pendidikan PRA untuk membiasakan para pekerja lapangan dengan metoda PRA dan menjelaskan kepada mereka mengenai keberhasilan/ tidaknya mereka dalam permainan peran (*role plays*). Ada baiknya juga bila kepada para peserta ditunjukkan film atau video mengenai kegiatan PRA.

Berikut diberi contoh dari jadwal hari bagi *workshop* pendidikan yang disusun berdasarkan pengalaman di Indonesia, sebagai berikut:

Hari	Topik
Pertama	<b>Perkenalan dan Perencanaan</b> <i>Partisipan diperkenalkan dengan proyek dan satu sama lainnya. Didasarkan pada pengalaman mereka sebelumnya di lingkungan dan masyarakat, para pekerja lapangan diminta mengusulkan sebuah "peta korupsi" dari tempat yang mengilustrasikan kasus dan struktur apa yang mereka ketahui.</i>
Kedua dan Ketiga	<b>Pelatihan</b> <i>Perkenalan prinsip dasar dari penelitian partisipatif Gambaran iktisar dari teknik partisipatif yang digunakan Latihan praktek untuk setiap teknik</i>
Keempat dan Kelima	<b>Tes Lapangan</b> <i>Setiap partisipan sebaiknya mempunyai kesempatan mempraktekkan teknik secara bertahap</i>
Keenam	<b>Tanggapan masukan dan finalisasi metodologi</b>

### Langkah 3. Kunjungan Pertama ke Masyarakat yang Diteliti

Kunjungan ini berlangsung 10 hari dan dalam waktu itu Tim harus menyelenggarakan 1 Rapat Perkenalan, sedangkan beberapa anggota Tim lainnya mengadakan 3 diskusi dalam kelompok focus dan 25-30 wawancara. Adalah sangat penting dalam pekerjaan lapangan bahwa bahasa yang dipakai mudah dimengerti oleh masyarakat bersangkutan. Bila perlu, maka FGD bisa diadakan dalam bahasa setempat.

Para penyelenggara hendaknya sebelum ini telah mengadakan pertemuan awal dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang dimaksudkan untuk memperkenalkan proyek ini, memperoleh statistik dasar, dan menerima persetujuan dan partisipasi dari para pimpinan di dalam proyek.

Adalah sangat penting juga, bahwa, selain mendidik pekerja lapangan, penyelenggara proyek juga mengadakan pertemuan berkala dengan seluruh Tim untuk memonitor perkembangan, membahas masalah-masalah, dan mempertajam maksud tujuan -yang sebaiknya dilaksanakan setiap malam selama berlangsungnya pekerjaan lapangan.

## Rapat Perkenalan dengan Masyarakat

Maksud tujuan dari pertemuan ini ialah:

- Memperkenalkan anggota tim riset dan proyek kepada masyarakat
- Untuk belajar mengenai taraf dan pola kemiskinan masyarakat bersangkutan
- Untuk menemu-kenali kaum miskin di antara masyarakat ini agar, mereka bisa diundang ke FGO dan diwawancarai.

Pertemuan ini hendaknya terdiri dari kira-kira 30 orang dari masyarakat tersebut, termasuk mereka yang miskin dan tidak-miskin, dan juga pimpinan formal dan informal. Organisasi bersangkutan juga sudah menentukan siapa-siapa yang akan diundang, yang namanya diketahui dari pekerja lapangan, untuk menghadiri pertemuan tersebut, yang diselenggarakan pada waktu dan tempat yang ditentukan adalah terbaik oleh masyarakat ini. Organisasi menyediakan paling sedikit 2 (dua) Fasilitator, dan dua penulis, agar bisa diadakan dua kelompok partisipatif. Masing-masing sub-kelompok mempunyai seorang fasilitator dan seorang pencatat/penulis. Pada waktunya, para peserta sendiri akan diminta untuk menulis atau menggambarkan masalah-masalah yang dibahas.

Langkah-langkah dalam pertemuan ini dilaksanakan sebagai berikut:

- (a) Perkenalan tim riset dan tujuan proyek
- (b) Permainan untuk melonggarkan ketegangan antar-peserta (*ice-breaking*)

Permainan ini bisa berupa apa saja yang bisa membuka komunikasi antar- anggota. Di mana mungkin, kembangkan permainan yang berhubungan dengan korupsi. Salah satu permainan bisa berupa permintaan kepada masing-masing peserta untuk bercerita tentang kasus korupsi yang diketahui atau pernah dialami dalam enam bulan lalu.

### (c) Klasifikasi Kekayaan

Para peserta diminta untuk menjelaskan dalam bahasanya sendiri apa yang dipahami dengan istilah "kaum miskin", yang berpendapatan menengah, dan yang kaya (atau bagaimana saja pembagian pengertian mengenai kekayaan terbagi dalam masyarakat). Sekali istilah-istilah disepakati, peserta diminta untuk

menggambar apa yang menjadi pengertian mereka tentang masing-masing kategori, dan akhirnya untuk setuju untuk membubuhi 7 ciri-ciri khas dari orang-orang yang dianggap tergolong dalam masing-masing kategori. Fasilitator kemudian memberi warna kepada masing-masing kategori.

#### **(d) Pemetaan Masyarakat**

Pakailah kertas yang besar (sangat besar -yaitu 4 halaman flipchart yang disambung) dimana peserta bisa membuat gambar mengenai masyarakat mereka. Ada beberapa peserta yang langsung mengangkat pena, akan tetapi fasilitator hendaknya memperhatikan bahwa tidak ada yang digambar secara jelas sebelum adanya konsensus di antara peserta. Adapun peta masyarakat digambar sebagai berikut:

- batas-batas geografis masyarakat, termasuk sungai
- jalan-jalan
- pembagian batas administratif, jika ada
- bangunan umum dan kantor-kantor terpenting
- rumah-rumah para pemimpin desa

Selanjutnya para peserta diminta untuk menggambar rumah-rumah orang miskin, yang berpendapatan menengah dan yang kaya, dalam warna yang berbeda-beda atau menggunakan stiker yang berwarna beda.

Pada akhir sesi ini terlihat bahwa kelompok tersebut telah menggambar peta dari masyarakat mereka yang menunjukkan, antara lain lokasi dari para orang miskin dalam masyarakat, sesuai pemahaman mereka dengan istilah "miskin". Apabila hal ini sudah berhasil, maka mereka diminta untuk menulis daftar kaum miskin di dalam masyarakat mereka (nama, umur, pekerjaan).

Sementara itu tim menegaskan kembali bahwa peta ini adalah milik masyarakat dan akan tetap menjadi milik mereka se usai proyek.

Setelah pertemuan ini, maka tim menyusun daftar 30 orang dari antara rumah tangga miskin, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- adanya jumlah yang sama antara pria dan wanita

Ke-30 orang ini akan menjadi dasar dari ke-3 kelompok fokus berikut untuk diajak berdiskusi. Mereka harus diundang secara pribadi (bila perlu dengan undangan resmi dari pemimpin masyarakat) dan maksud tujuan dari proyek ini akan dijelaskan kepada mereka. Sebaiknya para pekerja lapangan masing-masing mengunjungi rumah calon peserta untuk langsung mengundang mereka untuk mengikuti FGD. Ini juga akan memberi kesempatan kepada . pekerja lapangan untuk mengkonfirmasi bahwa peserta yang dipilih memang benar tergolong dalam kategori “miskin” di antara masyarakat ini

Penyelenggara kemudian membuat salinan dari peta masyarakat untuk dipergunakan pada pertemuan keesok harinya (ketompok wanita dan pria masing-masing diberi satu peta).

Gambar dari Pelatihan Pemetaan Masyarakat  
Yogyakarta 2001



Orang itu berkata: "Itu rumah yang jelek dekat rumah kepala desa"

## Diskusi Pertama dalam Kelompok Fokus

Idealnya, kelompok terdiri dari kaum miskin yang homogen, tetapi ini tidak selalu dimungkinkan. Beberapa orang yang tidak-miskin juga ingin hadir (mungkin karena berminat, atau adalah pemimpin masyarakat, atau menemani anggota keluarga). Salah satu cara untuk menangani hal demikian ialah segera mengadakan pertemuan terpisah dengan kelompok yang tidak-miskin, tugas mana bisa diserahkan kepada pekerja lapangan bila perlu. Pertemuan non-miskin ini juga bermanfaat, untuk mempelajari bagaimana persepsi mereka yang tidak-miskin akan berbeda dengan yang miskin, disamping mereka bisa memberi keterangan tambahan yang tidak diketahui oleh orang miskin.

Tujuan pertemuan ini ialah:

- untuk memperkenalkan tim riset kepada anggota masyarakat yang miskin
- untuk memperkenalkan proyek kepada para warga miskin
- untuk mengerti sebab/akibat korupsi, luas lingkungannya, dan persepsi dari para peserta mengenai kerugian/biaya ataupun keuntungan dari korupsi.

Sebagaimana diutarakan diatas, kelompok hendaknya terdiri dari 30 orang, yang terdiri dari pria dan wanita dalam jumlah yang sama.

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam pertemuan ini ialah

- (a) Perkenalkan anggota Tim kepada peserta**
- (b) Jelaskan mengenai proyek**
- (c) Adakan permainan untuk memperlancar komunikasi**  
*(mungkin berupa /akon mengenai suatu kegiatan korupsi yang dikena/)*

Untuk kegiatan partisipatif berikut, bagilah kelompok menjadi dua, yaitu kelompok wanita dan kelompok pria, masing-masing dengan fasilitator dan pencatat sendiri.

- (d) Pemetaan dari jawatan-jawatan pelayanan umum**  
Peserta diminta untuk mempelajari peta yang telah digambar oleh kelompok pertama, dan menambah langsung berbagai data diatas peta tersebut bila mereka mau, terutama menyangkut jawatan-jawatan yang memberi pelayanan umum.
- (e) Pungutan liar**  
Fasilitator mulai membahas masalah "pungutan liar" dan menanyakan pengalaman masing-masing peserta (misalnya, untuk menempatkan anak Anda di sekolah, berapa yang harus dibayar?). Secara lisan Fasilitator

menanyakan berbagai pengalaman mereka, lalu membagi kartu kepada peserta untuk menulis berapa jumlah uang pelicin yang telah mereka bayarkan sepanjang satu tahun lalu bagi setiap jawatan, dan berapa kali. Lalu, tempatkan kartu tersebut di jawatan yang tergambar di peta. Apabila pembayaran diberi lebih dari sekali, mereka harus menulis di kartu lain, dengan menulis jumlah yang telah mereka beri setiap kali mereka membayar.

Fasilitator perlu mempelajari para peserta dan memutuskan sejauh mana ia harus mengarahkan pembahasan. Adalah penting bahwa pembahasan tertuju kepada pengalaman nyata saja dan janganlah dibahas masalah “korupsi” dalam arti abstrak yang akan mengundang reaksi defensif (misalnya, ini tidak terjadi di masyarakat kita). Fasilitator bisa menanyakan kepada para peserta tentang salah satu jawatan saja, atau mengenai semua jawatan yang ada.

Fasilitator lalu mempelajari jawatan mana yang menerima kartu dan dalam jumlah berapa, serta berapa kali. Bila informasi ini lalu disampaikan kepada para peserta, akan terjadi diskusi yang hidup.

Selanjutnya, Fasilitator harus sudah menyiapkan daftar berikut ini, dan dibantu pencatat dan para peserta, mengisi daftar berikut dan pola yang terjadi.

Perhatikan juga bahwa satu jawatan bisa diberi lebih dari satu macam “pungutan liar.”

Instansi	Contoh dari korupsi	Jumlah rata-rata uang sogok	Frekuensi uang sogok	Jumlah orang yang membayar
misalnya				
Polisi	Pelanggaran lalu lintas	10,000	1	3
	Perkelahian Massa	350,000	1	1



Sementara itu para pewawancara di antara tim mencatat beberapa nama dan kasus yang menjanjikan untuk menjadi wawancara yang berguna, dan mulai mewawancarai orang-orang tersebut.

**(f) Persepsi**

*Fasilitator kemudian menggambar garis atau membentangi tali di lantai, dan menggambar muka senang di satu sisi dan muka sedih di sisi lain dan yang biasa di tengah. Istilah-istilah yang menggambarkan “muka senang” dan “muka sedih” bisa beragam. Beberapa kelompok bisa juga menginginkan “muka marah”. Para peserta kemudian diminta untuk berdiri ditempat-tempat yang menggambarkan perasaan mereka pada waktu mereka memberi suatu pungutan liar, apakah dengan senang hati atau kurang senang.*

*Fasilitator kemudian menyusun matrix yang menggambarkan perasaan para peserta, dengan memberi tanda ‘X’ bagi masing-masing pilihan peserta.*

Instansi	Contoh korupsi	Tak Bahagia	Acuh tak acuh	Bahagia
dll				

*Pada akhirnya, menjumlah seluruh “x” yang ada dan dibubuhkan keatas kertas, lalu meminta kepada para peserta untuk memikirkan hasil yang tercapai. Fasilitator juga bertanya mengapa para peserta memilih suatu tempat tertentu, mengapa mereka senang, kurang senang atau acuh pada suatu keadaan. Apa masalah yang menimbulkan perasaan ini -masalah-masalah ini bisa di atas flipchart.*

*Kepada para peserta sekali lagi diyakinkan bahwa semua akan dikembalikan kepada mereka sesuai proyek.*

menyiapkan Diskusi Kelompok Fokus ke dua, fasilitator menyiapkan kertas yang besar (empat kali ukuran flipchart), dimana tertera jawatan-jawatan dan kasus korupsi yang telah ditemu-kenali.

## Diskusi Kelompok Fokus yang Kedua

### (a) Presentasi Permasalahan dan Ranking

Fasilitator mengisi bagian pertama dari tabel berikut yang terdiri dari jawatan dan kasus korupsi utama.

	Instansi 1	Instansi 2	Instansi 3	Instansi 4	Instansi 5
simbol atau lukisan					
Contoh korupsi 1					
Contoh korupsi 2					
dll					
Ruang voting					
Total suara					

Fasilitator kemudian menyampaikan temuan kepada para peserta, yang sekarang telah berkumpul lagi dalam paripurna-dan menganjurkan para peserta untuk memberi komentar/tambahan/pertanyaan. Apabila terdapat tambahan jawatan dan kasus korupsi yang terlupakan, ini perlu ditambah.

Lalu, para peserta diminta untuk memilih tiga kasus korupsi, yang menurut hematnya adalah yang paling mendesak, paling membebani, dan merupakan kasus yang paling penting. Kepada para pria diberi tiga stiker biru dan wanita diberi 3 stiker merah. Masing-masing peserta diminta untuk maju kedepan dan menempelkan ketiga stikernya di tempat yang menurutnya adalah yang paling tepat di atas tabel. Mereka boleh menempatkan semua stiker di satu tempat, atau di beberapa tempat. Apabila semua peserta mengerjakan ini bersamaan, maka terjadi kurang kesempatan untuk menengok dimana kawannya menempelkan stikernya, dan dengan demikian, mempengaruhinya. Dengan demikian kerahasiaan juga akan lebih terjaga.

Fasilitator kemudian menjumlah semua stiker dan menulis hasilnya di atas tabel-dengan menggaris-bawahi jawatan yang menerima jumlah tertinggi. Dari kegiatan ini, ternyata bahwa masyarakat itu telah menemu-kenali tiga masalah yang mereka anggap paling penting.

Fasilitator lalu menulis di atas kartu-kartu ke -3 nama jawatan yang dianggap terkorupsi dan menempelkannya di tengah kertas kosong, sambil menyiapkan kartu kosong untuk kegiatan berikut.

### **(b) Flow Diagram tentang Sebab dan Akibat**

Para peserta dibagi dalam tiga kelompok dan masing-masing kelompok diberi satu masalah korupsi yang merupakan hasil pertemuan lalu. Maksud kegiatan ini ialah untuk mencari tahu dari para peserta sendiri mengenai apa sebab dan akibat dari korupsi di suatu jawatan.

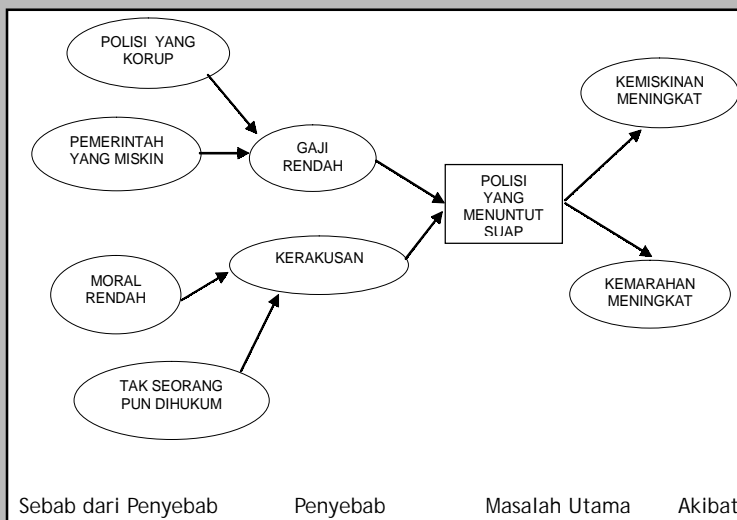
Untuk membantu para peserta dalam proses ini, fasilitator mengadakan semacam latihan. Ia mengambil sebagai contoh jawatan ke-4 yang menerima kartu terbanyak. Bilanglah masalahnya ialah "polisi minta uang pelicin". Fasilitator menulis ini di atas kartu dan ditempatkan di tengah-tengah kertas lebar. Fasilitator berpura-pura menjadi polisi yang meminta bayaran dan bertanya: menurut Anda apa yang ia lakukan? Jawaban dari peserta bisa mengatakan: "karena ia perlu uang", atau "karena dia tamak". Fasilitator kemudian menulis "gaji rendah" dan "ketamakan", dan menempatkannya sebelah kiri dari kartu utama.

Fasilitator kemudian bertanya "apa alasan yang mendasar?", yaitu alasan dari ketamakan atau gaji rendah. Jawaban dibubuhi ke atas kartu dan dengan demikian telah terisi seluruh sisi kiri diagram. Sering "alasan dasar" memberi indikasi mengenai lingkungan atau sebab sistematis dibalik korupsi dan sejauh mana hal ini diketahui oleh kaum miskin.

Pada langkah berikut, fasilitator bertanya bagaimana sebab-sebab diatas saling berkaitan, dan apa yang menyebabkan apa. Berdasarkan jawabah yang diterima, sebab-sebab ini dihubungkan dengan panah-panah.

Pada waktu baik fasilitator maupun peserta cukup puas dengan sebab-sebab yang tertera dan saling keterkaitannya, fasilitator bertanya: *Apa akibat semua ini terhadap Anda atau orang lain menyangkut uang pelicin ini?* Jawaban yang diterima bisa: *"membuat saya Jebih miskin"*, atau *"membuat saya marah kepada polisi"*, Kartu dimana tercantum "meningkatkan kemiskinan" dan "meningkatkan kemarahan" ditempatkan sebelah kanan dari kartu utama, dan dikaitkan dengan panah yang menunjukkan arus pikir.

Para peserta selanjutnya diminta untuk memikirkan hal-hal ini secara lebih mendalam, pertajam komentar mereka, sampai mereka puas dengan apa yang ditulis dan apa yang menjadi sebab-sebab dasar dan akibat dari ketiga kasus korupsi yang terpenting yang mereka hadapi.



Sementara itu, untuk mempersiapkan Diskusi Kelompok fokus ke-3, para fasilitator mempersiapkan suatu peta untuk "solusi dari pemikiran bersama", sedangkan para wawancara telah mengadakan berbagai wawancara dan harus sudah siap dengan cerita mengenai kejadian-kejadian nyata.

## Diskusi Kelompok Fokus Ketiga



Tujuan untuk menyelenggarakan Diskusi Kelompok ke Tiga ialah untuk memaparkan semua penemuan yang sudah tersusun rapi kepada seluruh kelompok (pria dan wanita) dalam paripurna, dan mengajak mereka berpikir dan berdiskusi mengenai tindakan-tindakan yang bisa dilaksanakan untuk mengadakan perubahan.

Satu wakil dari masing-masing sub-kelompok (1 wanita, dan 1 pria dari masing-masing kelompok) memaparkan penemuan bersama yang sudah disusun dalam bentuk peta dan arus pikir (flow chart) tentang masalah-masalah yang ditemu-kenali, lalu menanyakan masing-masing sub-kelompok apabila ada yang ingin ditambah pada apa yang telah dipaparkan. Disini terbuka kesempatan bagi peserta untuk memberi tanggapan mengenai pandangan yang berbeda antara wanita dan pria.

Jikalau para pewawancara sudah mengadakan beberapa wawancara bisa lebih menjelaskan masalah-masalah yang sedang dibahas, maka bisa menceritakan hal-hal yang telah mereka dengar -tanpa menyebut nama.

### Tukar Pikiran Mengenai Jalan Keluar

Sekali lagi fasilitator mengambil sebagai contoh pilihan ke-4 -dalam contoh ini “polisi yang minta uang pelicin”. Fasilitator hendaknya membahas dahulu sisi sebab dari peta alur pikir, dan bertanya kepada kelompok paripurna tentang:

1. Lima sebab utama yang bisa menerangkan mengapa si-polisi berperilaku demikian.
2. Apa yang bisa kita lakukan untuk merubah perilaku demikian
3. Apa yang bisa dilakukan orang lain untuk merubah perilaku ini.

Dengan memperhatikan lima sebab utama, para peserta akan diminta untuk menulis pikiran dan tanggapan mereka di atas kartu dan menempatkannya di atas tabel berikut:

MASALAH			
Sebab	Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyebab tersebut?	Bagaimana ?	
		Aksi / tindakan yang dilakukan masyarakat lokal	Aksi / tindakan yang dilakukan masyarakat lokal
etc			

Fasilitator mengingatkan peserta agar tetap realistis, dan tidak menyampaikan saran-saran yang muluk-muluk tentang apa yang bisa dilakukan oleh orang lain. Jangan ada yang ditulis sebelum adanya pembahasan yang mendalam.

Para fasilitator kemudian mencatat tindakan yang disarankan, dan siap untuk menyampaikannya pada Kunjungan kedua ke Masyarakat (li hat No.6) dimana diundang LSM setempat dan pers.

## Wawancara

Tujuan dari wawancara ialah untuk memperdengarkan dengan lebih jelas suara dari orang miskin, sehingga apa yang dialami seorang atau sekelompok orang dan yang hanya diketahui secara terbatas dalam lingkungan yang sangat terbatas, dapat terdengar secara lebih luas. Wawancara demikian juga memperkenalkan kepada publik di luar lingkungan masyarakat tersebut secara rinci mengenai apa yang terjadi di masyarakat miskin sebagai akibat dari korupsi, dan bagaimana korupsi ini dilaksanakan. Wawancara melengkapi Diskusi Kelompok Fokus dan menjadi bahan bagi studi kasus berikutnya. Dari antara 30 wawancara yang disarankan, kemungkinan terdapat sepertiga yang membahas masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai suatu komunitas, dan dua-pertiga yang membahas masalah-masalah pribadi.

Mereka yang diwawancarai adalah yang ditemu-kenali di Diskusi Kelompok Fokus, atau mereka yang diusulkan oleh Kelompok Fokus. Pewawancara harus mencari waktu dan tempat yang cocok bagi mereka yang akan diwawancarai. Wawancara yang diadakan tidak dipandu dari questionnaire yang tetap, tetapi akan diajukan beberapa pertanyaan baku, lalu pewawancara mengundang pembicaraan yang lebih luas. Begitu masalah yang dihadapi ditemukan, maka delapan pertanyaan berikut akan menjadi pegangan, yaitu:

---

Apa?	Dimana?	Kapan?
Siapa?	Berapa?	Bagaimana?
Dampak?	Mengapa?	

---

**Studi Kasus Perorangan:** dalam hal ini diperlukan gambaran yang lebih rinci mengenai orang tersebut dan keluarganya, apakah korupsi terjadi secara rutin dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merugikan hidup mereka, atau terjadi sekali saja, walaupun telah menurunkan tingkat hidup dari keluarga atau pribadinya.

**Studi Kasus Masyarakat:** dalam hal ini kita perlu menangkap kepentingan orang bersangkutan, pandangan hidupnya, motivasi serta peran yang telah dimainkan dalam kasus bersangkutan. Perlu dicatat situasi dan kondisi pada waktu mana tindakan dilaksanakan, disamping dicatat dampak apa yang dialami masyarakat pada umumnya karenanya. Sejumlah wawancara bisa disatukan menjadi satu studi

### Korupsi dalam pembagian beras JPS Yogyakarta, 2001



Masyarakat dimintai bayaran lebih atas beras subsidi yang dibagikan ("Beras JPS")

## Langkah 5. Menyiapkan Bahan Informasi yang Terkumpul

Sementara ini Tim telah berada 10 hari di antara masyarakat studi sambil secara intensif mengumpulkan pendapat maupun pengetahuan mereka. Sejak awal, Tim telah menjanjikan kepada masyarakat bahwa segala informasi yang diterima dari masyarakat akan dikembalikan kepada masyarakat bersangkutan.

Langkah pertama untuk memenuhi janji ini ialah dengan memaparkan semua bahan dan data yang tertera di flip charts, peta, diagram dll. kepada masyarakat tersebut. Sebagai langkah berikut, maka semua informasi harus disusun secara sistematis dalam bentuk Laporan kepada Masyarakat tentang pengalamannya dan pandangannya terhadap korupsi. Bagaimanapun, walaupun presentasi disusun oleh Tim -dalam arti kata bahwa Tim menyusun penemuan secara sistematis dan tercetak -perlu selamanya ditekankan bahwa semua ini merupakan informasi dan pengetahuan serta pengalaman masyarakat itu sendiri -sedangkan tugas Tim hanyalah untuk mengumpulkan, menyusun dan memaparkan.



Demikian pula semua studi kasus harus dikumpulkan, diperbaiki, dan ditulis dalam penulisan jurnalistik, yang dikembalikan kepada masyarakat untuk dipergunakan di kemudian hari dalam hubungan mereka dengan orang-orang luar. Sebelum semua informasi diberikan, Tim hendaknya meyakini bahwa semua nama peserta, terutama yang memberi wawancara, telah dihapus, untuk melindungi pemberi keterangan terhadap tindakan balasan di kemudian hari.

Sebelum diadakan Kunjungan Kedua ke Masyarakat, Tim mempersiapkan laporan yang jelas dan sederhana untuk dibaca, tentang penemuan di antara masyarakat, dan kumpulan studi kasus, yang disampaikan/ diberi kepada masyarakat bersangkutan dengan cara yang oleh masyarakat setempat dianggap terbaik. Juga apabila telah diambil video, masyarakat harus juga menerima salinan darinya.

## **Langkah 6. Kunjungan Kedua ke Masyarakat**

Adapun tujuan dari kunjungan ini ialah sebagai berikut:

- Menayangkan/memaparkan kembali hasil-hasil dari Kunjungan Pertama, baik kepada peserta awal maupun kepada peserta yang lebih luas dari antara mereka yang berkepentingan (stakeholders), untuk mengingatkan mereka mengenai beban yang dipikul oleh orang miskin akibat korupsi.
- Untuk menemukan organisasi-organisasi setempat yang ingin menangkap momentum dari minat yang telah dikembangkan dalam masyarakat, dan yang akan menindak-lanjutinya. Tujuannya ialah agar terjadi dukungan terhadap jalan-jalan keluar yang disarankan dan adanya pembaruan yang diharapkan.

Sebelum Kunjungan Kedua (yaitu kira-kira tiga minggu sesudah kunjungan pertama) penyelenggara telah menghubungi berbagai organisasi setempat untuk menyusun daftar para stakeholders yang perlu diundang.

### **Pertemuan Masyarakat**

Yang diundang ke pertemuan ini ialah semua peserta dari Oiskusi Kelompok Fokus, ditambah dengan pemimpin-pemimpin masyarakat setempat di luar kelompok miskin.

dan

## **Pertemuan Para *Stakeholders***

Ini merupakan pertemuan untuk menyampaikan informasi, yang diselenggarakan di kota di mana riset diadakan (tidak perlu diadakan di daerah masyarakat studi). Yang diundang adalah LSM, berbagai asosiasi masyarakat dan pers setempat -dan juga wakil-wakil lembaga-lembaga yang melayani masyarakat.

### **Pertemuan Masyarakat**

Pada dasarnya, pertemuan ini merupakan rekapitulasi yang lebih sistematis dari butir-butir inti yang telah dibebaskan terlebih dahulu pada Kunjungan Pertama. Penyelenggara menempelkan di dinding bahan-bahan dan peta asli, sambil memberi presentasi singkat, agar bisa menarik komentar, pandangan, pemikiran bagi langkah tidak lanjut, dan tersedia cukup waktu untuk pertanyaan-pertanyaan.

Paparan meliputi:

- Tujuan Riset
- Ringkasan mengenai berbagai kasus korupsi, pandangan-pandangan dan urutan permasalahan.
- Ringkasan tentang sebab dan akibat
- Ringkasan tentang saran-saran penyelesaian  
Serta memberi informasi tentang:
- Wawancara

Merupakan hal terpenting untuk diyakini bahwa masyarakat mengakui bahwa penemuan dari para penyelenggara memang sarna dengan apa yang mereka ingat dan pahami telah berlangsung dalam forum diskusi. Bila demikian, maka semua dokumentasi hendaknya dikembalikan kepada masyarakat itu untuk digunakan mereka. Akan tetapi, bila ada kekhawatiran, maka hal-hal demikian perlu dihadapi, dan para penyelenggara harus bersedia untuk menyelesaikan laporan mengenai pertemuan-pertemuan sesuai apa yang disetujui oleh masyarakat itu.

Oleh karena pada pertemuan ini juga hadir mereka yang tidak mengikuti pertemuan-pertemuan lalu, penyelenggara harus bisa menjawab pertanyaan maupun komentar dari mereka. Sejauh mungkin, yakini bahwa masyarakat bersangkutan memiliki kembali semua temuan, dan apabila ada pertanyaan, maka merekalah yang seharusnya bisa menjawab, dengan menjelaskan mengapa mereka berbicara demikian, dan berkesimpulan demikian.

Pertemuan harus memberi banyak peluang untuk mencari jalan-jalan keluar - dengan membandingkan saran-saran dari Kelompok Fokus dengan saran-saran dari kelompok yang lebih luas, sambil menarik pandangan mereka mengenai bagaimana saran-saran bisa dilaksanakan, dan apakah mungkin terlaksana.

Para penyelenggara hendaknya memberi-tahukan kepada para undangan mengenai adanya Pertemuan Kedua ini jauh sebelumnya. Juga penting bahwa peserta dari Kelompok Fokus hadir pada Pertemuan Kedua ini.

### **Pertemuan Para *Stakeholders***

Yang diundang pada Pertemuan Kedua ini adalah mereka yang dianggap oleh penyelenggara maupun masyarakat bersangkutan cukup prihatin terhadap keadaan mereka dan ingin melakukan sesuatu. Mereka biasanya terdiri dari dua kelompok -LSM setempat dan asosiasi masyarakat; serta pers (cetak, radio dan TV) -tetapi juga termasuk wakil-wakil dari pegawai pemerintah dari lembaga-lembaga dimana terdapat korupsi, apabila penyelenggara menganggap bahwa ada reformis di antara mereka, yang bisa mengadakan perubahan dari dalam.

Pada pertemuan ini, sebagaimana pada Pertemuan Pertama, penyelenggara mengulangi lagi:

- Maksud dan tujuan riset
- Ringkasan dari berbagai kasus korupsi serta pandangan-pandangan, termasuk urutan permasalahan
- Ringkasan dari sebab dan akibat
- Ringkasan dari saran-saran penyelesaian.  
Serta memberi informasi tentang:
- Wawancara

Kemudian diajukan beberapa saran tindak-lanjut seperti talk-show di radio atau TV, kampanye pendidikan masyarakat, serta advokasi bagi kasus-kasus tertentu.

Selanjutnya pembahasan diarahkan kepada penunjukan berbagai organisasi yang ingin menindak-lanjuti pekerjaan ini, yang bisa diadakan melalui tiga cara, yaitu:

1. Bekerjasama dengan masyarakat bersangkutan untuk menindak-lanjuti beberapa saran penyelesaian yang telah mereka sendiri ajukan. Antara lainnya, bisa berupa fasilitasi pada pertemuan masyarakat, pendidikan kewarganegaraan, memberi bantuan hukum dan lain-lain.
2. Membantu masyarakat bersangkutan untuk mengadakan lobby dengan penentu kebijakan dan pengambil keputusan tentang perlunya perubahan

kebijakandan kegiatan. ataupun untuk melaksanakankebijakan-kebijakan yang ada tetapi tidak pernah dilaksanakan.

3. Menyebarluaskan hasil-hasil riset. agar suara dari para orang miskin bisa didengar dengan lebih jelas, dan bagaimana sebenarnya keadaan dari mereka yang miskin akibat korupsi. diketahui oleh umum.

Ada baiknya kegiatan tindak-lanjut disusun menurut sektor (misalnya, polisi. perusahaan listrik), dan harus memperhatikan:

- Tiga prioritas terpenting yang dihadapi masyarakat bersangkutan
- Keahlian dari LSM yang akan memberi bantuan.

Kegiatan yang terfokus kepada beberapa kegiatan akan lebih bermanfaat daripada melaksanakan banyak kegiatan tanpa adanya dukungan yang memadai.

Ketiga cara yang disarankan untuk mengadakan tindak lanjut bisa dilaksanakan bersama-sama sebagai bagian dari rencana yang terintegrasi. atau bisa dilaksanakan terpisah pada tingkatan berbeda -satu dengan masyarakat setempat, dan yang lain dengan DPRD-nya. misalnya.

Apabila ada LSM yang ingin menindaklanjuti kasus-kasus tertentu di dalam masyarakat. maka LSM pekerja lapangan bisa menjadi fasilitator dan penghubung antara LSM-LSM ini dengan masyarakat.

LSM setempat dan pers perlu dianjurkan untuk bekerja sangat peka dalam hubungan dengan masyarakat, untuk menghindari bahwa masyarakat justru dirugikan dan menerima balas dendam, apabila informasi yang ada disalah gunakan.

LSM setempat yang tidak mempunyai program yang tepat. atau yang tidak mempunyai cukup dana untuk melaksanakan pekerjaan ini. perlu dibantu dengan nama-nama lembaga yang mungkin bisa memberi dana.

## Kesimpulan

---

Metodologi diatas memberi peluang bagi mereka yang berada di luar lingkup lingkungan dan bekerjasama dengan mereka yang berada di dalamnya, untuk mengerti dan menerima informasi yang sistematis tentang Korupsi yang terjadi di masyarakat miskin, dan akibat dari padanya. Metodologi ini juga memberi kesempatan bagi mereka yang berada di dalamnya untuk, dengan bantuan pihak luar, memikirkan secara tuntas, tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki nasib mereka sendiri, sambil memperkenalkan mereka kepada orang-orang yang mungkin bisa memberi bantuan.

Metodologi ini sudah diterapkan secara terbatas di 3 kawasan kumuh di tiga daerah di Indonesia (Yogyakarta, Jakarta dan Makassar), tetapi belum diterapkan di daerah pedesaan. Adalah pandangan dari para penyelenggara bahwa metodologi ini berpotensi untuk digunakan secara lebih luas, dan menganjurkan agar metodologi ini dicoba, diadaptasi, serta diuji hipotesanya. Pengalaman praktis telah diadakan oleh Yayasan Bina Swadaya.

Tulisan lebih rinci mengenai proyek ini bisa ditemui di

**“Kaum Miskin Bersuara”**

publikasi mengenai temuan inti dari riset dan 17 studi kasus

**Laporan Sintesis Hasil Lapangan**

dilakukan oleh Bina Swadaya (tersedia hanya dalam bahasa Inggris)

Semua hal tersebut diatas masih dalam proses pelaksanaan.  
Apabila anda hendak berpartisipasi, tanggapan dan masukan bisa dikirimkan kepada:

**PROGRAM KERJA ANTI-KKN**

Kemitraan bagi Pembaruan  
Tata Pemerintahan di Indonesia  
Gedung Surya (Lantai 9) Jalan Thamrin Kav 9,  
Jakarta Pusat, Indonesia  
Telepon 62-21-323062, Faks. 62-21-230-2933

Email: [richard.holloway@undp.org](mailto:richard.holloway@undp.org)  
[agam@undp.org](mailto:agam@undp.org)  
[steggemann@worldbank.org](mailto:steggemann@worldbank.org)

## Ilustrasi Proses



Foto orang sedang melakukan pemetaan masyarakat di Yogyakarta

Foto orang sedang bekerja membuat diagram alur proses di Makassar



Foto orang sedang bekerja membuat diagram alur proses di Makassar

Diagram Alur Proses Distribusi Beras JPS di Makassar

